BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara formil sejak tahun 1945 (UUD pra amandemen) telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) *Negara Indonesia adalah negara hukum* Indonesia, Ismail Suny mencatat empat syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban Pemerintah untuk dilaksanakan, Yaitu, Hak Asasi Manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan Peradilan Administrasi. sebagai negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan (*equity before the law*).

Pada hakikatnya, setiap manusia dilahirkan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin pria maupun wanita. Namun karena perbedaan kodrat, maka banyak masyarakat yang menganggap bahwa kedudukan wanita lebih lemah daripada pria. Dengan pandangan demikian maka wanita sering mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi dalam segala lini kehidupan termasuk dalam segi pelaksanaan kegiatan dalam wujud pekerjaan. Tingginya tuntutan ekonomi dan tidak cukupnya penghasilan yang didapat membuat daya tarik tersendiri bagi para pekerja untuk melakukan cara tindakan demi mendapatkan setiap pekerjaan. Dengan berbagai kemajuan disegala bidang sering dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa memandang jenis pekerjaan

asalkan memiliki hasil serta capaian dalam menunjang kehidupan. Terlihat tidak sedikit antusias masyarakat baik kaum pria hingga yang cukup menonjol adalah kaum wanita itu sendiri.

Kerja merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu penghidupan yang layak. Pekerjaan sangat berarti dalam upaya kelangsungan hidup dan mengaktualisasi diri sehingga dapat lebih bermakna dan dihargai dalam lingkungan sekitarnya.¹ Dalam hubungan buruh/pekerja dan pengusaha berlaku hukum otonomi dan hetronomi, dan adanya hukum otonomi dan hetronomi inilah yang melahirkan hukum perburuhan bersifat hukum privat dan hukum publik. Bersifat hukum privat artinya hukum perburuhan mengatur hubungan antara buruh dengan pengusaha dimana masing-masing pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi hubungan kerja diantara mereka. Bersifat hukum publik menunjukkan pada adanya peraturan hukum yang bersifat memaksa yang harus ditaati oleh pengusaha dan buruh apabila mereka melakukan hubungan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Dalam aspek dunia pekerjaan, setiap pekerja perempuan sangat potensial berada pada posisi tersulit, hal tersebut disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki yang hidup ditengah masyarakat yang selalu menempatkan pria sebagai sosok yang superior, sedangkan wanita dinyatakan sosok yang interior

¹ Muslan Abdurrahman, 2006, Malang. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*. UMM

(lemah).² Hal tersebut kemudian menghambat pekerja wanita dalam mengembangkan segala potensi dan bakat dalam diri mereka masing-masing khususnya dalam melakukan pekerjaan. Meskipun isu keadilan dan kesetaraan gender telah diperjuangkan sedemikian rupa, namun tampaknya kaum perempuan selalu dianggap sebagai pihak kedua setelah kaum pria.

Mengingat bahwa pada dasarnya setiap manusia itu berhak untuk diperlakukan sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Kemudian Pasal 28D ayat (2) menyatakan *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*³ Atas realitas sosial yang menjadi asumsi dibanyak kalangan tersebut terkait adanya diskriminasi hak pekerja wanita maka lebih diperjelas penekanannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 49 ayat (2) menyebutkan *“wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atas profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”*⁴ Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pekerja wanita sangat membutuhkan yang namanya pemenuhan hak

² Joupy G.Z Mambu. *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita*(menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Manado, 2013, hlm 5

³ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2) dan Pasal 28 ayat (2).

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (2)

sebagai jaminan hak asasi setiap manusia dan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi segala hak-haknya.

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁵ Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan tindakan hukum. Unsur dari perlindungan hukum tersebut meliputi; Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara dan adanya sanksi hukum kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum.⁶

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja wanita baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain.

⁵ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47

⁶ *Ibid*, Hlm. 23

- a. *Convention on the Elimination of Againsts Women* yang telah diartikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam dunia pekerjaan perbedaan permasalahan lainnya yang dihadapi oleh pekerja wanita yang sudah berumah tangga dan belum berumah tangga yang dilihat dari sifat dan subyeknya. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan dalam peraturan dan pendirian wanita dalam mendapatkan kelonggaran seperti cuti hamil, cuti haid, dan bekerja pada malam hari. Apa yang kemudian terjadi dilapangan yang tidak banyak orang tau terhadap gangguan sexual yang seringkali didapat oleh wanita di dunia kerja. Dari ucapan yang verbal atau komentar, tindakan fisik yang mengandung unsur sexual, yang muncul dari rekan kerja hingga majikan. Bentuk tindakan demikian termaksud dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diantaranya:

- a. Pada Pasal 81 ayat (1) “pekerja wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.”
- b. Pasal 82 Ayat (1) “pekerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah)

bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.”

- c. Pasal 82 ayat (2) “pekerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.”

Berdasarkan uraian di atas maka, setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan perlindungan hukum apabila dirugikan oleh pihak lain, sesuai ketentuannya dan telah memenuhi unsur daripada perlindungan hukum itu sendiri, sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tentu dapat mendorong tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dengan demikian, hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan dapat terpenuhi. Artinya, negara Indonesia dituntut untuk melakukan perencanaan terhadap hal tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar terciptanya kesadaran atas kewajiban suatu negara. Akan tetapi faktanya, Sampai saat ini di Indonesia lapangan pekerjaan sangat terbatas. Karena Indonesia belum mampu menyediakan pekerjaan seperti yang diamanatkan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, sehingga secara ekonomi masyarakat Indonesia banyak yang memprihatinkan.

Permasalahan mengenai pekerja wanita dalam dunia ketenagakerjaan sudah menjadi isu nasional yang merambat hingga pada sektor kedaerahan, salah satunya terdapat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Memiliki Jumlah

penduduk di tahun 2023 sebanyak 204,92 ribu jiwa.⁷ Kota ini dikenal dengan kemajuan pembangunan dan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat meningkat dari tahun ke tahun, sektor yang paling dominan adalah di bidang perdagangan. dimana terdapat antusias masyarakat baik lokal maupun para pembisnis diluar daerah dalam mengembangkan usaha misalnya, usaha pertokoan hingga dengan kebereradaan perusahaan yang mampu menompang pendapatan ekonomi masyarakat.

Hadirnya beberapa perusahaan seperti (Perusahaan Theko Digital Solusindo dan Perusahaan Hakasima Inti), telah dioperasikan sejalan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Namun seiring dengan Progres perusahaan tersebut nyatanya belum mampu mengakomodir secara keseluruhan mengenai hak hak pekerja khususnya bagi pekerja wanita sehingga dengan kondisi demikian menjadi sebuah alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih detail mengenai pemenuhan dari pada hak-hak pekerja wanita dan juga upaya pemerintah Kota Ternate dalam memberikan perlindungan atas jaminan hak-hak pekerja wanita itu sendiri.

Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja wanita masih belum sepenuhnya dapat terealisasi. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita di Maluku Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”**

⁷ Data Statistik Kota Ternate Tahun 2023 diakses pada 10 September 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Wanita Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak terhadap pekerja wanita berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita Undang-Undang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru, salah satunya menjadi masukan ilmiah dan penambahan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan pengetahuan kepada para mahasiswa hukum, para praktisi hukum, penyelenggara pemerintahan, dan masyarakat umumnya.